



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth.

1. Pelaku Usaha
2. Pengelola Tempat Ibadah
3. Pengelola Perkantoran
4. Pengelola Pendidikan
5. Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang
6. Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang
7. Seluruh Masyarakat
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan penyesuaian kondisi wilayah Kota Malang serta untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan di tingkat Kelurahan di lingkungan

Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19; dan

2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di tingkat Kelurahan di lingkungan Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

E. Isi Edaran

1. Camat dan Lurah mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan;
4. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan;
5. Posko tingkat Kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan;
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, Posko tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat Kelurahan;
8. Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat;
9. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota Malang, yang terdiri dari:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From*

- Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
 - c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dilakukan penerapan protokol kesehatan serta kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB; dan
 - 2) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB,
 - e. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Tempat ibadah dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan;
 - g. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
 - h. Transportasi Umum dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan jam operasional pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan dilakukan penerapan protokol kesehatan.

F. Sanksi

- 1. Walikota melalui Tim Satuan Tugas Kota Malang memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19;

2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Dalam rangka upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

G. Penutup

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Malang, agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan *call center* melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
2. PPKM Mikro dan PPKM Kota Malang mulai berlaku bersamaan sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Bahwa apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf G angka 2 tidak dilakukan perpanjangan, maka pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 23 Februari 2021
WALIKOTA MALANG,
SUYIAJI



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Dalam rangka upaya untuk menegakkan dan menghidupkan kembali baik dengan cara persuasif kepada semua pihak dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

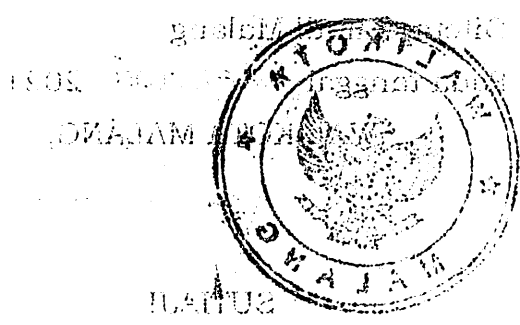
Demikian

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan pembangunan serta pengelola pendidikan di Kota Malang agar melaporkan ke Dinas Kesehatan dengan call center melalui layanan Panggilan Cepat di PSC (Public Safety Center) 119 dengan menggunakan layanan 119 ext 9 dan nomor 08115504119 apabila membutuhkan informasi tentang Covid-19 atau informasi lainnya.

2. PPKM Mikro dan PPKM Kota Malang mulai berlaku bersamaan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

3. Dalam rangka hasil evaluasi sebelumnya dimaklumi bahwa tidak diadakannya pertemuan, maka sebelum Pembentukan Pembinaan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) anggota pada ketentuan yang berlaku dan

4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pengertiannya disampaikan dengan kasih.



1. Kepala Kepolisian Resor Kota Malang
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
 3. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang